

## **Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 di Sulawesi**

**S Syugiarto\*<sup>1</sup>, M. Nur Alamsyah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Administrasi Pembangunan Palu, Jl. Nuri No.18 Tanamodindi, Sulawesi Tengah 94117, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9 Tondo, Sulawesi Tengah 94148, Indonesia

Email: [\\*ughenk007@gmail.com](mailto:*ughenk007@gmail.com); [mnuralamsyahsip@gmail.com](mailto:mnuralamsyahsip@gmail.com)

Naskah diterima: 28/10/2021; Revisi: 24/11/2021; Disetujui: 1/12/2021

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 dan untuk melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi di pulau Sulawesi dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Tulisan ini sendiri menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Penekanan) untuk menganalisa kebijakan yang diambil oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi kepustakaan (*Library Research*), dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 serta data kasus terkonfirmasi positif covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Interval waktu yang dilihat yaitu dimulai pada 2 Juli 2021 sampai 13 Juli 2021. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 6 Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 dan melihat data kasus penyebaran covid-19. Setelah itu menganalisa dampak dari peraturan tersebut, apakah dapat menekan penyebaran covid-19 di 6 provinsi yang ada atau hanya meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah tersebut. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19, hal ini terlihat dari adanya *gap* yang cukup jauh dalam peningkatan serta penurunan jumlah kasus covid-19. Kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di tekan.

**Kata kunci:** *analisis kebijakan; penanggulangan covid-19; penekanan*

## *Policy Analysis of Covid-19 Response in Sulawesi*

### *Abstract*

*The purpose of this study is to find out the policies taken by the provincial government on the island of Sulawesi in suppressing the spread of Covid-19 and to see the policies taken by the provincial government on the island of Sulawesi in suppressing the spread of Covid-19 in their area. This paper itself uses a disease outbreak control strategy (emphasis) to analyze the policies taken by the Province of South Sulawesi, North Sulawesi Province, Central Sulawesi Province, Southeast Sulawesi Province, West Sulawesi Province and Gorontalo Province. The method used in this paper is a literature study (Library Research), with reference to regulations issued by the Provincial Government in suppressing the spread of COVID-19 as well as data on confirmed cases of COVID-19 in 6 provinces on the island of Sulawesi. The time interval seen is starting on July 2, 2021 until July 13, 2021. The data analysis technique in this study is carried out by looking at the regulations issued by the Governments of 6 Provinces in suppressing the spread of COVID-19 and looking at data on cases of the spread of COVID-19. After that, analyze the impact of the regulation, whether it can suppress the spread of covid-19 in 6 existing provinces or only increase the number of confirmed cases of positive COVID-19 in the region. The results of the research in this paper show that the Covid-19 control policies issued by 6 provinces in Sulawesi have not shown maximum results in suppressing the spread of Covid-19, this can be seen from the gap that is quite far in increasing and decreasing the number of Covid-19 cases. . The policies taken in the form of PPKM, examinations using PCR tests and rapid tests for travellers, tightened entrances to provincial areas so that the PSBB has not been able to suppress the spread of Covid-19 in 6 provinces. The policies that have been made have not been implemented properly, so the spread of Covid-19 is still difficult to suppress.*

**Keywords:** *policy analysis; covid-19; suppression*

### **Pendahuluan**

*Corona Virus Disease 2019* atau dapat disebut juga dengan nama Covid-19 merupakan suatu penyakit yang pertama kali menyebar di kota Wuhan pada 17 November 2019, yang mana menginfeksi seorang warga berusia 55 tahun (Alam, 2020). Virus ini pertama kali dilaporkan sebagai jenis pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya (Baskara, 2020). Namun berdasarkan laporan WHO ke-37, kasus pertama yang diidentifikasi sebagai Covid-19 yaitu pada tanggal 8 Desember 2019 dan pada saat laporan tersebut dibuat tercatat bahwa kasus positif di dunia saat itu sebanyak 81.109 kasus sesuai rilis WHO. Per tanggal 15 Juni 2021, jumlah kasus yang terjadi di seluruh dunia yaitu sebanyak 175.333.154 jiwa

Mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang telah menjadi epidemi di China pada akhir tahun 2019, pada 28 Januari 2020 BNPB mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No 9.A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia. Landasan pembuatan Surat Keputusan (SK) tersebut mengacu pada Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu, serta Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kondisi Dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu. Dalam Surat Keputusan Badan

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tersebut, status darurat berlaku selama 32 hari (28 Januari 2020 – 28 Februari 2020). Namun, melihat situasi penyebaran virus corona yang semakin masif di dunia, BNPB kembali mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Indonesia, yang mana SK BNPB tersebut berlaku selama 91 hari (29 Februari 2020 – 29 Mei 2020).

Indonesia pada saat sebelum munculnya Covid-19 hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dengan memberikan stimulus fiskal sebanyak 10,2 Triliun Rupiah pada tanggal 25 Februari 2020. Namun tak dapat dipungkiri bahwa pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah Covid-19 masuk ke Indonesia, misalnya memasang 195 unit thermal scanner di 135 bandara (Sulaiman, 2020). Tetapi, pencegahan awal tersebut tidak efektif menimbang bahwa jumlah kasus covid-19 di Indonesia telah menyentuh angka diatas 1 juta jiwa (Mufarida, 2021) dan Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus aktif Covid-19 tertinggi se-Asia (Dwianto, 2021) Adapun per tanggal 30 Juni 2021, jumlah kasus terkonfirmasi yaitu sebanyak 2.178.272 jiwa dan jumlah tersebut merupakan jumlah kasus tertinggi di seluruh negara ASEAN (Infeksi Emerging, 2021).

Penyebaran Covid-19 di tiap pulau yang ada di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya yaitu di pulau Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau yang terletak di tengah wilayah Indonesia. Pulau Sulawesi sendiri memiliki 6 Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Gorontalo (Kompas.com, 2020).

1. Sulawesi Selatan : Jumlah total kasus yang terkonfirmasi di Sulawesi Selatan pada 4 Juli 2021 yaitu sebanyak 65.139 jiwa dan Kota Makassar menjadi lokasi dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang menyentuh angka diatas 30 ribu jiwa (SULSEL Tanggap Covid-19, 2021).
2. Sulawesi Utara : Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Sulawesi Utara pada 3 Juli 2021 yaitu sebanyak 16.515 jiwa dan Kota Manado menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak yang telah dikonfirmasi, yaitu sebanyak 5.542 jiwa (corona.sulut.prov.go.id, 2021).
3. Sulawesi Tengah : Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Sulawesi Tengah pada 3 Juli 2021 yaitu sebanyak 13.921 jiwa dan terdapat 5 wilayah yang menjadi zona merah, yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-Una serta Kabupaten Morowali (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, 2021).
4. Sulawesi Tenggara : Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Sulawesi Tenggara pada 3 Juli 2021 yaitu sebanyak 11.816 jiwa dan Kota kendari menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 5.281 jiwa (Sultra Tanggap Corona, 2021).
5. Sulawesi Barat : Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Provinsi Sulawesi Barat pada 1 Juli 2021 yaitu sebanyak 5.933 jiwa dan Kabupaten Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah kasus terkonformasi tertinggi, yaitu sebanyak 2.076 jiwa (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2021).
6. Gorontalo : Jumlah kasus yang terkonfirmasi di Provinsi Gorontalo pada 1 Juli 2021 yaitu sebanyak 5.893 Jiwa. Dari total kasus tersebut, sebanyak 5.483 telah sembuh, 224 jiwa masih dalam perawatan serta 186 jiwa meninggal (Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo, 2021).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu Anderson dalam (Islamy, 2009). Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip serta maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Ide kebijakan sendiri melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah (Abidin, 2012) mengemukakan beberapa isi dari kebijakan, yang mana isi tersebut yaitu : 1). Tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*), bukan sesuatu tujuan yang sekedar diinginkan saja; 2). Rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; 3). Program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud; 4). Keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program, serta; 5). Dampak (*effect*), yakni dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat. Kebijakan publik sendiri merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Suharto, 2008)). Menurut Taufiqurakhman (2014) terdapat dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu : 1). Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami, dikarenakan maknanya ialah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2). Kebijakan publik merupakan suatu hal yang mudah diukur, dikarenakan ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan dalam pencapaian cita-cita yang telah ditempuh.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu di analisis untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Analisis kebijakan sendiri merupakan suatu proses yang memerlukan pendekatan multidisiplin ilmu yang terkait dengan situasi dan masalah kebijakan yang muncul. Beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain: ilmu politik, filsafat, ekonomi, sosiologi (Negara, 2021). Sedangkan menurut Dunn (2017) analisis kebijakan ialah proses penyelidikan multidisiplin yang bertujuan untuk menciptakan, penilaian kritis, dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sebagai disiplin pemecahan masalah, hal tersebut mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis.

Menurut Simonovic (2015) manajemen bencana merupakan suatu interaksi yang sangat kompleks antara lingkungan alam, populasi manusia (aksi, reaksi serta persepsi) dan lingkungan buatan (jenis serta lokasi). Sedangkan menurut Kusmansari (2015) manajemen bencana ialah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, sukarelawan dan pihak swasta, yang mana meliputi rencana, struktur serta pengaturan secara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan dalam keadaan darurat. Dalam proses manajemen bencana terdapat hal yang sangat penting dalam siklus manajemen bencana, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan (Kusmansari, 2015; Simonovic, 2010).

Adapun beberapa riset terkait analisis kebijakan dengan fokus manajemen bencana yaitu :

1. (Deegan, 2006). Tulisan ini menjelaskan ruang kebijakan dalam menganalisis kebijakan bencana alam dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis (*System*

*Dynamics Approach*). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa *System Dynamics Model* melengkapi pendekatan manfaat-biaya tradisional dan meningkatkan kualitas analisis secara keseluruhan.

2. Klein dkk. (2016). Tulisan ini melakukan analisis sistem dinamis dari berbagai strategi perlindungan terhadap banjir. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa ada empat hal utama dalam mewakili keragaman kebijakan yang dapat diadaptasi untuk menangani banjir di berbagai negara, yaitu : investasi, persepsi publik tentang tindakan pemerintah, keahlian negara tertentu dan alokasi sumber daya. Adapun hasil yang ditunjukkan dalam tulisan ini ialah bahwa model tersebut dapat berguna untuk pemilihan dan wawasan kebijakan tetapi tidak dapat digunakan untuk menilai kebijakan di negara lain.
3. (Khaldun & Tawil, 2019). Tulisan ini menganalisa peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Palu. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa nilai, fakta serta tindakan yang dilihat dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut kurang maksimal.
4. Anugerah dkk. (2021) Tulisan ini menganalisa implementasi kebijakan *resettlement* bagi masyarakat korban tsunami di Lampung Selatan. Pada pelaksanaan kebijakan *resettlement*, hal tersebut berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang dipindahkan, seperti dalam aspek sosial dan ekonomi.
5. Wiibowo dan Munir (2021). Tulisan ini mengeksplorasi kebijakan penanggulangan bencana kebakaran di Indonesia. Dalam tulisan ini dielaskan bahwa kebakaran dapat diprediksi dan kebijakan preventif masih memberikan dampak yang signifikan dibandingkan dengan kebijakan yang bersifat supresi.
6. (Kayi & Sakarya, 2020). Tulisan ini bertujuan menganalisis kebijakan strategi pemberantasan dan mitigasi dalam penanganan wabah melalui contoh pandemi Covid-19 di beberapa negara, diantaranya ialah Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Swedia, Denmark, Norwegia, Jerman, Italia, Turki, Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan Cina. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa strategi mitigasi didekati dengan kecurigaan. Pendekatan yang bertujuan untuk mencapai kekebalan kelompok tampaknya lebih cocok untuk situasi di mana dimungkinkan untuk melindungi kelompok berisiko tinggi dengan pemberian vaksin. Untuk proses penanggulangan bencana, perlu mempertimbangkan konteks serta proposal dibuat dengan mengadopsi pendekatan yang dapat disesuaikan dengan konteks suatu negara.
7. Warsito dkk. (2021). Tulisan ini bertujuan untuk melihat perubahan kebijakan pengurangan risiko bencana menjadi tindakan terukur dalam agenda pembangunan Indonesia dengan menggunakan analisis isi kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah transformasi terjadi dari konsep ke implementasi ketahanan kesehatan masyarakat. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa tujuan tertentu dari setiap tuas ketahanan untuk mencapai ketahanan kesehatan masyarakat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015–2019 tidak terdefinisi dengan baik. Refleksi yang tidak lengkap dari ketahanan kesehatan masyarakat dalam agenda pembangunan yang sedang berlangsung menyoroti perlunya nilai-nilai ketahanan kesehatan masyarakat yang eksplisit dalam Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia 2020-2024 untuk menghindari kebijakan tersebut menjadi “peluru perak” lain dengan target yang tidak jelas.



Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas dan melihat penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Sulawesi terus mengalami peningkatan, penulis melihat bahwa terdapat suatu masalah yang dapat diteliti terkait kebijakan dalam penanggulangan Covid-19. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul : Analisis kebijakan penanggulangan Covid-19 Di Sulawesi. Landasan yang digunakan dalam melihat penanggulangan Covid-19 yaitu menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit (Mitigasi dan Penekanan) (Ferguson dkk., 2020). Namun, dalam tulisan ini hanya menggunakan strategi pengendalian wabah penyakit pada poin penekanan. Hal ini disebabkan Indonesia, khususnya pulau Sulawesi telah tersebar Covid-19, sehingga proses mitigasi tidak perlu di teliti lebih lanjut Penelitian akan dilakukan pada proses penekanan wabah penyakit atau Covid-19.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian Kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggunakan metode observasional, komunikatif, dan dokumenter dalam setting alam dalam memahami dunia sosial (Fischer & Miller, 2017). Lebih lanjut dijelaskan oleh Denzin dan Lincoln (2011) bahwa penelitian kualitatif melibatkan studi penggunaan dan pengumpulan berbagai metode empiris, diantaranya ialah studi kasus, pengalaman pribadi, introspektif, kisah hidup, wawancara, observasional, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan momen rutin dan bermasalah dalam kehidupan individu. Sedangkan studi kepustakaan (*Library Research*) sendiri merupakan penelitian yang menggunakan sumber – sumber kepustakaan untuk mendapatkan data (Zeid, 2004)(Zeid, 2004). Lebih lanjut Mary (2008) menjelaskan bahwa : “Studi kepustakaan (*Library Research*) bukanlah misteri atau keberuntungan, tetapi penyelidikan yang peneliti kendalikan dari awal hingga akhir, meskipun peneliti biasanya tidak dapat mengatakan sumber apa yang akan di temukan. Di sisi lain, penelitian kepustakaan adalah bentuk penyelidikan terstruktur dengan alat, aturan, dan teknik tertentu”.

Mengacu pada penjelasan diatas, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 serta data kasus terkonfirmasi positif covid-19 di 6 Provinsi yang ada di Pulau Sulawesi. Interval waktu yang dilihat yaitu dimulai pada 2 Juli 2021 sampai 13 Juli 2021. Alasan rentang waktu yang dilihat lebih dari 1 minggu dikarenakan untuk melihat kenaikan serta penurunan jumlah kasus di 6 provinsi tersebut. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dari 6 Provinsi dalam menekan penyebaran covid-19 dan melihat data kasus penyebaran covid-19. Setelah itu menganalisa dampak dari peraturan tersebut, apakah dapat menekan penyebaran covid-19 di 6 provinsi yang ada atau hanya meningkatkan jumlah kasus terkonfirmasi positif covid-19 di wilayah tersebut.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Penekanan Penyebaran Covid-19 di Sulawesi**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia yaitu sebanyak 2.178.272 jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan penekanan terhadap penyebaran Covid-19 agar tidak menimbulkan lonjakan yang signifikan. Pemerintah perlu berupaya untuk menekan penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meningkat. Cara menekan penyebaran Covid-19 yang digunakan oleh

tiap Provinsi berdeda, dan cara yang berbeda tersebut juga akan memperlihatkan hasil yang berbeda dalam proses penekanan penyebaran Covid-19 di Provinsi yang ada di Sulawesi.

### 1. Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan merupakan provinsi di pulau Sulawesi dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak. Untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 yang akan semakin meningkat, Andi Sudirman selaku plt Gubernur Sulawesi Selatan memperketat aturan di pintu masuk wilayah Sulawesi Selatan serta akan terus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga jumlah kasus Covid-19 mengalami penurunan (Syawaluddin, 2021). Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di wilayah mereka. Sebab, berdasarkan data penyebaran Covid-19 Sulawesi Selatan mulai 5 Juli – 13 Juli 2021 memperlihatkan bahwa terdapat ketambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 3.303 Jiwa.

Tabel 1. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Selatan

| Tanggal      | Kasus Terkonfirmasi<br>(Penambahan Jumlah Positif) |
|--------------|--|
| 5 Juli 2021  | 219 Jiwa   |
| 6 Juli 2021  | 249 Jiwa   |
| 7 Juli 2021  | 485 Jiwa   |
| 8 Juli 2021  | 304 Jiwa   |
| 9 Juli 2021  | 707 Jiwa   |
| 10 Juli 2021 | 573 Jiwa   |
| 11 Juli 2021 | 385 Jiwa   |
| 12 Juli 2021 | 277 Jiwa   |
| 13 Juli 2021 | 104 Jiwa   |
| <b>TOTAL</b> | <b>3.303 Jiwa</b>                                  |

*Sumber : <https://covid19.sulselprov.go.id/data>*

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta memperketat pintu masuk wilayah Sulawesi Selatan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi tidak memperlihatkan hasil yang cukup signifikan. Dari tabel diatas juga diperlihatkan bahwa pada 9 Juli 2021 terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 707 jiwa. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan, mengingat bahwa terdapat kenaikan kasus lebih dari 300 jiwa, yang mana pada pada 8 Juli 2021 hanya menyentuh angka 304 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penekanan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan belum dapat berjalan dengan maksimal.

### 2. Sulawesi Utara

Mengantisipasi penyebaran covid-19 yang semakin meningkat di Sulawesi Utara, Pemerintah Provinsi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/21.4093/Sekr-Dinkes Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Ketentuan Pemeriksaan Swab PCR dan Rapid Antigen Bagi Pelaku Perjalanan Di Provinsi Sulawesi Utara. Surat Edaran tersebut menjelaskan bahwa masyarakat yang ingin memasuki wilayah Provinsi Sulawesi Utara wajib melakukan tes Swab PCR dan bagi masyarakat ke luar daerah diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 5 hari. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum dapat menekan penambahan jumlah kasus positif Covid-

19. Hal ini terlihat mulai 4 Juli – 13 Juli 2021, jumlah penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 1.765 Jiwa. Dari 1.765 jiwa tersebut, terdapat 77 kasus yang berada di luar kota.

Tabel 2. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Utara

| <b>Tanggal</b> | <b>Kasus Terkonfirmasi<br/>(Penambahan Jumlah Positif)</b> |
|----------------|--|
| 4 Juli 2021    | 94 Jiwa  |
| 5 Juli 2021    | 11 Jiwa  |
| 6 Juli 2021    | 162 Jiwa   |
| 7 Juli 2021    | 128 Jiwa   |
| 8 Juli 2021    | 216 Jiwa   |
| 9 Juli 2021    | 277 Jiwa   |
| 10 Juli 2021   | 216 Jiwa   |
| 11 Juli 2021   | 144 Jiwa   |
| 12 Juli 2021   | 91 Jiwa  |
| 13 Juli 2021   | 426 Jiwa   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.765 Jiwa</b>  |

Sumber : <https://corona.sulutprov.go.id/data>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kenaikan serta penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19 tiap harinya cukup signifikan. Tanggal 5 Juli 2021 jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 11 Jiwa, yang mana pada keesokan harinya mengalami lonjakan hingga 162 jiwa. Selain itu, pada 13 Juli 2021 mengalami peningkatan yang sangat drasitis, yang mana sehari sebelumnya hanya 91 jiwa kini menjadi 426 jiwa. Kenaikan serta penurunan kasus positif tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tentang ketentuan pemeriksaan swab PCR dan rapid antigen bagi pelaku perjalanan di Provinsi Sulawesi Utara tidak dapat berjalan maksimal. Hal itu semakin diperkuat dengan adanya kasus terkonfirmasi Covid-19 luar kota sebanyak 77 jiwa.

### 3. Sulawesi Tengah

Untuk mengantisipasi penyebaran yang semakin masif, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/545/DIN.KES Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro (Arshandi & Masrafi, 2021). Dalam Surat edaran (SE) tersebut, pembatasan dilakukan di : 1). Tempat kerja; 2). Kegiatan belajar mengajar; 3). Sektor esensial; 4). Kegiatan tempat makan/minum; 5). Kegiatan pusat perbelanjaan; 6). Kegiatan konstruksi; 7). Rumah ibadah; 8). Kegiatan area publik; 9). Kegiatan seni, budaya dan sosial; 10). Kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring, serta; 11).Transportasi umum.

Berdasarkan data penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah pada 4 Juli – 13 Juli 2021, terdapat ketambahan jumlah kasus positif sebanyak 1.478 Jiwa.



Tabel 3. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Tengah

| Tanggal      | Kasus Terkonfirmasi<br>(Penambahan Jumlah Positif) |
|--------------|--|
| 4 Juli 2021  | 56 Jiwa  |
| 5 Juli 2021  | 77 Jiwa  |
| 6 Juli 2021  | 107 Jiwa   |
| 7 Juli 2021  | 118 Jiwa   |
| 8 Juli 2021  | 157 Jiwa   |
| 9 Juli 2021  | 233 Jiwa   |
| 10 Juli 2021 | 135 Jiwa   |
| 11 Juli 2021 | 184 Jiwa   |
| 12 Juli 2021 | 83 Jiwa  |
| 13 Juli 2021 | 328 Jiwa   |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.478 Jiwa</b>                                  |

Sumber : <https://dinkes.sultengprov.go.id/category/covid-19/>

Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Edaran Nomor 443/545/DIN.KES Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro pada 28 Juni 2021 tersebut belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah. Hal tersebut terlihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 dan pada 13 Juli 2021 terjadi kenaikan kasus diatas 200 jiwa. Dari awal dikeluarkannya kebijakan PPKM sampai saat ini belum terlihat cukup signifikan dalam mengatasi lonjakan kenaikan jumlah positif Covid-19 tiap harinya di wilayah Sulawesi Tengah.

#### 4. Sulawesi Tenggara

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang semakin masif, Nur Endang Abbas selaku Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa pelaksanaan 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) masih sangat perlu dilakukan di tingkat Kabupaten / Kota, dan juga perlu melakukan komunikasi publik yang efektif agar meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pemberian vaksin Covid-19 (Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021). Selain itu, dikeluarkannya Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 443.2/2840 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Atas Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi landasan bagi seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menekan penyebaran Covid-19 di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Antisipasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menerapkan pelaksanaan 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) serta PPKM yang dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 belum maksimal. Berdasarkan data penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tenggara, pada 2 Juli – 13 juli 2021 tercatat bahwa penambahan jumlah kasus positif Covid-19 sebanyak 1.510 jiwa.

Tabel 4. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Tenggara

| Tanggal      | Kasus Terkonfirmasi<br>(Penambahan Jumlah Positif) |
|--------------|--|
| 2 Juli 2021  | 199 Jiwa   |
| 3 Juli 2021  | 137 Jiwa   |
| 4 Juli 2021  | 138 Jiwa   |
| 5 Juli 2021  | 32 Jiwa  |
| 6 Juli 2021  | 89 Jiwa  |
| 7 Juli 2021  | 119 Jiwa   |
| 8 Juli 2021  | 135 Jiwa   |
| 9 Juli 2021  | 124 Jiwa   |
| 10 Juli 2021 | 116 Jiwa   |
| 11 Juli 2021 | 237 Jiwa   |
| 12 Juli 2021 | 34 Jiwa  |
| 13 Juli 2021 | 150 Jiwa   |
| <b>TOTAL</b> | <b>1.510 Jiwa</b>                                  |

Sumber : <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Walaupun pada tanggal 5 Juli, 6 Juli dan 12 Juli 2021 jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 dibawah 100 jiwa, namun hal tersebut tidak menjadi sebuah pencapaian. Mengingat dari tanggal 2 Juli – 13 Juli 2021, kasus yang terkonfirmasi lebih dari 100 jiwa sebanyak 9 hari. Berdasarkan tabel diatas juga dapat dilihat bahwa terdapat lonjakan yang signifikan, pada 12 Juli 2021 kasus terkonfirmasi hanya 34 jiwa. Namun ke esokan harinya pada tanggal 13 Juli 2021 mengalami kenaikan diatas 400%. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan pelaksanaan 3T (*Tracing, Testing dan Treatment*) dan PPKM di Provinsi Sulawesi Tenggara belum memperoleh hasil yang diinginkan, yaitu menekan penyebaran Covid-19 sehingga grafik yang diperoleh akan melandai.

### 5. Sulawesi Barat

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah menambah Rumah Sakit khusus Covid-19. Rumah Sakit tersebut akan dibangun di lahan seluas 2 hektar dengan kapasitas 120 tempat tidur. Sulawesi Barat sendiri menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat terkait penyebaran Covid-19 di wilayah mereka terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Hendartyo & Silaban, 2021).

Berdasarkan data penyebaran Covid-19 di Sulawesi Barat, terlihat bahwa pada 2 Juli – 13 Juli 2021 terdapat peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 536 jiwa.

Tabel 5. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sulawesi Barat

| Tanggal      | Kasus Terkonfirmasi<br>(Penambahan Jumlah Positif) |
|--------------|--|
| 2 Juli 2021  | 26 Jiwa  |
| 3 Juli 2021  | 20 Jiwa  |
| 4 Juli 2021  | 64 Jiwa  |
| 5 Juli 2021  | 22 Jiwa  |
| 6 Juli 2021  | 45 Jiwa  |
| 7 Juli 2021  | 62 Jiwa  |
| 8 Juli 2021  | 45 Jiwa  |
| 9 Juli 2021  | 34 Jiwa  |
| 10 Juli 2021 | 63 Jiwa  |
| 11 Juli 2021 | 80 Jiwa  |
| 12 Juli 2021 | 3 Jiwa   |
| 13 Juli 2021 | 72 Jiwa  |
| <b>TOTAL</b> | <b>536 Jiwa</b>                                    |

Sumber : <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Kebijakan PPKM yang diberlakukan di Sulawesi Barat menjadi suatu kebijakan yang kurang efektif pada saat proses pengimplementasiannya. Sebab, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (2021) memperlihatkan bahwa pada bulan Mei – Juni 2021, jumlah kasus tertinggi hanya menyentuh angka 49 jiwa. Namun setelah diberlakukannya PPKM, jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 mengalami peningkatan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19 diatas 49 jiwa terdapat pada tanggal 4 Juli, 7 Juli, 10 Juli, 11 Juli dan 13 Juli 2021.

## 6. Gorontalo

Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 yang kian masif, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya dalam Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), selain itu peningkatan sumber daya manusia (SDM) Kesehatan dalam penanganan Covid-19 sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas tenaga kesehatan (Reza & Pembengo, 2020). Cara lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di wilayahnya yaitu dengan membuat Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Gorontalo.

Provinsi Gorontalo menjadi Provinsi dengan jumlah peningkatan kasus positif Covid-19 terendah di Pulau Sulawesi. Pada tanggal 2 Juli – 13 Juli tercatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hanya menyentuh angka 490 Jiwa. Selain itu, pada tanggal 4 Juli dan 11 Juli 2021 terlihat bahwa tidak ada penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 6. Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Gorontalo

| Tanggal      | Kasus Terkonfirmasi<br>(Penambahan Jumlah Positif) |
|--------------|--|
| 2 Juli 2021  | 25 Jiwa  |
| 3 Juli 2021  | 14 Jiwa  |
| 4 Juli 2021  | 0 Jiwa   |
| 5 Juli 2021  | 76 Jiwa  |
| 6 Juli 2021  | 37 Jiwa  |
| 7 Juli 2021  | 86 Jiwa  |
| 8 Juli 2021  | 41 Jiwa  |
| 9 Juli 2021  | 11 Jiwa  |
| 10 Juli 2021 | 25 Jiwa  |
| 11 Juli 2021 | 0 Jiwa   |
| 12 Juli 2021 | 121 Jiwa   |
| 13 Juli 2021 | 54 Jiwa  |
| <b>TOTAL</b> | <b>490 Jiwa</b>                                    |

Tabel 6

Sumber : <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Namun, terdapat kenaikan jumlah kasus yang sangat signifikan pada 12 Juli 2021. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada 11 Juli 2021 jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yaitu 0 atau tidak mengalami peningkatan. Tetapi pada keesokan harinya, jumlah kasus melonjak hingga 121 jiwa. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dirasa belum cukup maksimal, hal tersebut dikarenakan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di minggu pertama dan kedua bulan Juli mengalami kenaikan serta penurunan kasus yang cukup signifikan.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan Covid-19 yang dikeluarkan 6 Provinsi yang ada di Sulawesi belum memperlihatkan hasil yang maksimal dalam menekan penyebaran Covid-19. Sebab, jumlah kasus yang mengalami peningkatan serta pengurangan tiap harinya terdapat gap yang cukup jauh. Di Provinsi Sulawesi selatan mengalami peningkatan kasus pada 9 Juli 2021 dan mengalami penurunan kasus pada 10 Juli 2021, Provinsi Sulawesi Utara mengalami penurunan kasus pada 4 Juli dan 12 Juli 2021 serta mengalami peningkatan kasus pada 13 Juli 2021, Provinsi Sulawesi Tengah mengalami penurunan yang signifikan pada 12 Juli 2021 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 13 Juli 2021, Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan kasus pada 11 Juli 2021 dan mengalami penurunan kasus pada 12 Juli 2021, Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan jumlah kasus pada 12 Juli 2021 dan mengalami peningkatan pada 13 Juli 2021, serta di Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 5 Juli dan 12 Juli 2021.

Peningkatan serta pengurangan jumlah kasus yang terlihat di 6 Provinsi yang ada di Sulawesi dapat dijadikan sebagai acuan bahwa kebijakan yang diambil berupa PPKM, pemeriksaan menggunakan tes PCR dan rapid test bagi pelaku perjalanan, memperketat pintu masuk wilayah provinsi hingga PSBB yang dilakukan belum dapat menekan penyebaran Covid-19 di 6 Provinsi. Kebijakan yang telah dibuat belum dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga penyebaran Covid-19 masih sulit untuk di

tekan. Selain itu, diperlukan kerja ekstra dalam mengimplementasikan suatu kebijakan serta memberi sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

### Daftar Pustaka

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Salemba.
- Alam, S. O. (2020). Sama-sama 'Virus Corona', Ini Bedanya SARS-CoV-2 dan COVID-19. *Detik.com*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4912250/sama-sama-virus-corona-ini-bedanya-sars-cov-2-dan-covid-19>.
- Anugerah, T. H., Akib, M., & Tisnanta, H. (2021). Analisis Kebijakan Resettlement Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Lampung Selatan. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 52-62.  
<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/30963>
- Baskara, B. (2020). Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19. *Kompas*.  
<https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>.
- Deegan, M. A. (2006). Defining the policy space for disaster management: A system dynamics approach to US flood policy analysis. *Policy*, 1009(1), 1-29.  
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.442.2820&rep=rep1&type=pdf>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*. Routledge.
- Dwianto, A. R. (2021). *Indonesia Jadi Negara dengan Kasus Aktif COVID-19 Terbanyak di Asia*. *detik.com*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5356496/indonesia-jadi-negara-dengan-kasus-aktif-covid-19-terbanyak-di-asia>.
- Ferguson, N. M., Laydon, D., Nedjati-Gilani, G., Imai, N., Ainslie, K., Baguelin, M., Bhatia, S., Boonyasiri, A., Cucunubá, Z., & Cuomo-Dannenburg, G. (2020). Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand. Imperial College COVID-19 Response Team. *Imperial College COVID-19 Response Team*, 20.
- Fischer, F., & Miller, G. J. (2017). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. Routledge.
- Hendartyo, M., & Silaban, M. W. (2021). Kasus Covid-19 Naik 43,3 Persen, Pemerintah Perketat PPKM di Luar Jawa Bali. . *TEMPO*.  
<https://bisnis.tempo.co/read/1480661/kasus-covid-19-naik-433-persen-pemerintah-perketat-ppkm-di-luar-jawa-bali/full&view=ok>

- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Kayi, I., & Sakarya, S. (2020). Policy analysis of suppression and mitigation strategies in the management of an outbreak through the example of COVID-19 pandemic. *Infect Dis Clin Microbiol*, 2(1), 30-41.  
<https://www.idcmjournal.org/suppression-and-mitigation-strategies>
- Khaldun, R. I., & Tawil, Y. P. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011). *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 62-68.
- Klein, R., Meeuwsen, S., & Slinger, J. (2016). Strategies in an uncertain world: A Systems Dynamics analysis of different flood protection strategies. Proceedings of the 34th International System Dynamics Conference,
- Kusmansari, B. (2015). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Lokal*. Gava Media.
- Mary, G. W. (2008). *The Elements of Library Research: What Every Student Need to Know* pub. Princeton University Press.
- Mufarida, B. (2021). Update COVID-19: Positif 1.837.126 Orang, 1.691.593 Sembuh dan 51.095 Meninggal. *SindoNews*.  
<https://nasional.sindonews.com/read/445318/15/update-covid-19-positif-1837126-orang-1691593-semuh-dan-51095-meninggal-1622714768>
- Negara, L. A. (2021). *Modul Pelatihan Pengangkatan Pertama Calon Analis Kebijakan*. Lembaga Administrasi Negara. <https://www.ksi-indonesia.org/old/document/material/Modul-Pelatihan-Analis-Kebijakan.pdf>
- Simonovic, S. P. (2010). *Systems approach to management of disasters: methods and applications*. John Wiley & Sons.
- Simonovic, S. P. (2015). Systems approach to management of disasters—a missed opportunity? *IDRiM Journal*, 5(2), 70-81.  
[https://www.researchgate.net/profile/Slobodan-Simonovic-2/publication/304642744\\_Journal\\_of\\_Integrated\\_Disaster\\_Risk\\_Management\\_Systems\\_Approach\\_to\\_Management\\_of\\_Disasters\\_-\\_A\\_Missed\\_Opportunity/links/5775e00508ae4645d60bb09f/Journal-of-Integrated-Disaster-Risk-Management-Systems-Approach-to-Management-of-Disasters-A-Missed-Opportunity.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Slobodan-Simonovic-2/publication/304642744_Journal_of_Integrated_Disaster_Risk_Management_Systems_Approach_to_Management_of_Disasters_-_A_Missed_Opportunity/links/5775e00508ae4645d60bb09f/Journal-of-Integrated-Disaster-Risk-Management-Systems-Approach-to-Management-of-Disasters-A-Missed-Opportunity.pdf)
- Suharto, E. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai kebijakan Politik*. Alfabeta.
- Sulaiman, M. R. (2020). *Virus Corona, Kemenkes Periksa Pengunjung dari China di Dalam Pesawat*. Suara.com.  
<https://www.suara.com/health/2020/01/27/163046/virus-corona-kemenkes-periksa-pengunjung-dari-china-di-dalam-pesawat?page=all>.



- Syawaluddin, M. (2021). Pemprov Sulsel Perketat Akses Masuk di Bandara dan Pelabuhan. . *MEDCOM*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/ObzVW4Yb-pemprov-sulsel-perketat-akses-masuk-di-bandara-dan-pelabuhan>
- Taufiqurakhman, T. (2014). *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Universitas Moestopo Beragama Press.
- Warsito, G. M., Budiharsana, M. P., Burns, S., & Hartono, B. (2021). Hazed targets of the silver bullets: Transformation of disaster risk reduction policy into measurable actions in Indonesia development agenda. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 54, 102029.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2020.102029>
- Wibowo, A. D., & Munir, R. M. (2021). Eksplorasi Kebijakan Penanganan Bencana Kebakaran: Studi Kasus Di Indonesia. PROSIDING SEMINAR NASIONAL LINGKUNGAN LAHAN BASAH,
- Zeid, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.